



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRATIKNO
2. Jabatan : MENTERI KOORDINATOR BIDANG PMK
3. NHK : 180183

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.548.198.656

1. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/112 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.147.118.750
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.655.646.875
3. Tanah dan Bangunan Seluas 851 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.765.184.531
4. Tanah Seluas 552 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 980.248.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 607.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS HATCHBACK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CROWN SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 518.095.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 424.815.837

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.156.484.598

F. HARTA LAINNYA Rp. 299.743.281



Sub Total	Rp.	17.554.337.372
III. HUTANG	Rp.	1.218.294.636
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.336.042.736

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.